



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG KIDUL
UNIT KERJA : DINAS KESEHATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HERU SULISTYOWATI
2. Jabatan : DIREKTUR
3. NHK : 410696

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 5.200.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 716 m²/197 m² di GUNUNG KIDUL, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
2. Tanah Seluas 950 m² di MAGELANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
3. Tanah Seluas 611 m² di KOTAWARINGIN TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 1.100.000.000
4. Tanah Seluas 62056 m² di KOTAWARINGIN TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 330.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 502 m²/45 m² di KOTAWARINGIN TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 230.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 126 m²/45 m² di KOTAWARINGIN TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 127 m²/45 m² di KOTAWARINGIN TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 190.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 126 m²/45 m² di KOTAWARINGIN TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 190.000.000
9. Tanah dan Bangunan Seluas 126 m²/45 m² di KOTAWARINGIN TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 190.000.000
10. Tanah dan Bangunan Seluas 405 m²/120 m² di SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 435.500.000

1. MOBIL, WULING ALMAZ RS Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 340.000.000



2. MOBIL, TOYOTA INNOVA Tahun 2010, HASIL SENDIRI	Rp.	80.000.000
3. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2016, HASIL SENDIRI	Rp.	6.000.000
4. MOTOR, HONDA SUPRA X Tahun 2010, HASIL SENDIRI	Rp.	2.500.000
5. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2018, HASIL SENDIRI	Rp.	7.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	234.500.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.872.823.526
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	7.742.823.526
III. HUTANG	Rp.	255.333.333
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	7.487.490.193

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.